

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAN DANA DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

(Studi di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

MUCHAMMAD ALFIEYAN

NPM: 1521020144

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAN DANA DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

(Studi di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

MUCHAMMAD ALFIEYAN

NPM: 1521020144



Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H

Pembimbing II : Eko Hidayat, S.Sos, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Desa merupakan wilayah administratif pada beberapa Kabupaten di Provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945. Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya desa diberikan program oleh pemerintah yaitu Dana Desa untuk membangun dan memajukan desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada desa-desa dengan ditransfer melalui APBD Daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penerapan penggunaan Dana Desa banyak yang tidak tepat sasaran seperti di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu telah terjadi penyalahgunaan Dana Desa yang mengakibatkan pembangunan desa tidak terselesaikan dan pelaksanaan Dana Desa tidak berjalan sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di Pekon Adiluwih Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Prespektif Hukum Islam ?.

Jenis penelitian *field reasearch*. Dengan Sifat penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan data melalui pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), sistematika data (*systematizing*). Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Implementasi pencegahan penyalahgunaan Dana Desa di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu belum berjalan sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 82, bahwa masyarakat belum berperan aktif dan partisipatif dalam melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan pekon, masyarakat juga tidak ada yang melaporkan hasil pemantaun terhadap pembangunan desa kepada pemerintah pekon dan Badan Permusyawaratan Desa, dan pemerintah pekon juga tidak menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon kepada masyarakat termasuk Dana Desa. 2. Implementasi pencegahan penyalahgunaan Dana Desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam perspektif hukum Islam tidak dilaksanakan oleh seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan amanat. Berdasarkan Q.S Al-Anfal ayat 27 haram hukumnya bagi seseorang yang tidak amanah.



**KEMENTERIA AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : MUCHAMMAD ALFIEYAN
NPM : 1521020144
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
TENTANG IMPLEMENTASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
DANA DESA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi
di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih
Kabupaten Pringsewu)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

NIP. 195704031987031003

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.Sos, M.H.

NIP. 197512302003121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIA AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”** disusun oleh, **Muchammad Alfieyan, Npm: 1521020144** Program studi Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari: **Senin, 24 Februari 2020.**

Tim Penguji

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji II : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. KH. Kholidin, M.H.

NIP. 1962110119930310002

(Handwritten signatures of the examiners)

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ ۚ بَصِيرًا ٥٨

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S An-Nisā (4):58).



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada Allah SWT, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Supriono dan Ibu Sujinah tercinta mereka adalah motivator terbesar dalam hidup ini, yang selalu menyayangi, mendidik, dan membimbing dengan tulus dan ikhlas. pengorbonan dan kesabaran mereka sampai kini yang takkan pernah cukup untuk membalasasnya. Karena atas Do'a mereka saya diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa panjangkan usia serta melindungi dan memuliakan mereka, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Saudara Kandung ku: Alsya Aini Nur Khofifah, adikku yang selalu memberi dukungan serta menjadi sumber kebahagiaan dalam hidupku. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan serta menjadi kebanggaan kedua orang tua.
3. Keluarga besar Mbah Mangun (Alm) dan Mbah Tengin (Alm) yang selalu memberi dukungan, semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan serta do'a yang selalu mereka panjatkan demi kesuksesan keluarga.
4. Sahabat-sahabat baik ku: Daratul Inayah, Rianda Saputra, Ahmad Yunus, Siti Maisaroh, Susi Susanti, Mereka adalah salah satu yang membantu dalam mencari literatur-literatur untuk menyelesaikan skripsi ini serta orang-orang yg selalu mendengarkan keluh kesah dan senantiasa selalu memberikan dukungan.
5. Teman baikku: Bayu Mohammad Bakrie, Safly Andica Rahwan, Giri Agung Utomo, Didik Kurniawan, Citra Febi Putra Ulfi, Mereka adalah pembantu

dalam semangat mengerjakan skripsi ini serta orang-orang yang selalu berbagi suka maupun duka.

6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Muchammad Alfieyan dilahirkan di Adiluwih, pada tanggal 11 Desember 1995, anak pertama dari 2 bersaudara, anak dari pasangan Bapak Supriono dan Ibu Sujinah

Peneliti memulai pendidikan dari Taman Kanak-Kanak Tutwuri Handayani Bumi Dipasena Jaya Tulang Bawang, selesai pada tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri 01 Bumi Dipasena Jaya Tulang Bawang, selesai pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Gontor 9 Kalianda, selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Adiluwih, selesai pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015, melanjutkan pendidikan di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Syar'iyyah (Hukum Tatanegara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang berjudul **“Prespetif Hukum Islam Tentang Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”**, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Rasulullah beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang insya Allah kita semua mendapat syafaat di hari akhir, *āmīn*.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini saya menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh.Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H.selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan HukumIslam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si.selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H,selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan tak bosan-bosannya membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

5. Bapak Eko Hidayat S.H, M.H, selaku pembimbing II yang ikhlas meluangkan waktunya memberikan pengarahan dan memberikan masukan-masukan dalam penulisan karya ilmiah ini.
6. Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku Sekretaris jurusan Siyasah Syar'iyah.
7. Bapak Muhammad Irfan, M.H.I. yang ikut andil dalam kepengurusan dalam jurusan Siyasah Syar'iyah.
8. Seluruh dosen serta Civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
9. Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah melayani dalam hal administrasi dan lainnya.
10. Sahabat-sahabat Siyasah D 2015 yang telah banyak memberikan warna kehidupan dalam perkuliahan, memberikan semangat dan ide-ide baru sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.
11. Sahabat-Sahabat PPS 2019, Rianda, Daratul Inayah, yunus, Maysaroh, Diara, Susi,Risky, Esti, Witiar, yang selalu memberikan semangat.
12. Kerabat, teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terimakasih karna berkat do'a, dukungan, kasih sayang dan cinta kalian saya bisa sampai di titik sekarang ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita harapkan segala keridhaan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Bandar Lampung, 29 November 2019
Penulis

Muchammad Alfieyan
NPM. 1521020144



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Signifikansi Penelitian	7
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II DESA DAN DANA DESA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

A. Hukum Islam	
1. Pengertian Hukum Islam	15
2. Sumber-Sumber Hukum Islam	17
3. Tujuan Hukum Islam	25
4. Ciri-Ciri Hukum Islam	27
B. Desa Menurut Undang-Undang Dan Hukum Islam	
1. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang.....	29
2. Pengertian Desa Menurut Hukum Islam	33
C. Pengertian Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	
1. Pengertian Dana Desa.....	36
2. Fungsi Dana Desa	38
3. Tujuan Dana Desa	39
4. Pemantauan Dan Pengawasan Dana Desa.....	41
D. Tinjauan Pustaka	42

**BABIII PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Pelaksanaan Dana Desa Di Pekon Adiluwih Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	
1. Pelaksanaan Dana Desa Di Pekon Adiluwih Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.....	57
2. Sistem Pengelolaan Dana Desa Di Pekon Adiluwih Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	60
C. Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Di Pekon Adiluwih Kabupaten Pringsewu.....	67

BAB IV ANALISIS

A. Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Di Pekon Adiluwih Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.....	71
B. Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Di Pekon Adiluwih Dalam Prespektif Hukum Islam	74

BABV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Sumber Daya Manusia.....	50
2. Daftar Sumber Daya Pembangunan	51
3. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya.....	52
4. Struktur Organisasi	53
5. Struktur Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Adi Luwih	54
6. Rencana Anggaran Biaya Pekon Adi Luwih Tahun Anggaran 2016.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperjelas persepsi pokok permasalahan ini dalam menghindari kekeliruan dan salah persepsi didalam memahami judul proposal ini, maka perlu penjelasan judul dengan makna maupun definisi yang terkandung didalam judul proposal ini. Adapun arti dari pengertian judul itu sendiri adalah suatu gambaran karya ilmiah dalam rangka untuk memperjelas pokok bahasan, maka diperlukan penegasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul skripsi ini adalah Prespektif Hukum Islam Tentang Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam memahami maksud dan tujuan, penegasan judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut:

- Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an maupun sunah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.¹
- Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan untuk melakukan tindakan yang telah direncanakan secara cermat dan rinci.²
- Pencegahan adalah proses, pengawasan, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya

¹ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2014, h. 20.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 529.

yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

- Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.³
- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Berdasarkan penegasan judul diatas tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian terhadap bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan Dana Desa. Terbentuk suatu planing yang sudah dirancang oleh pemerintah secara matang jelas dan terperinci mengenai suatu program pemerintah dengan tujuan memberikan kepastian tentang Dana Desa yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunah Rasul beserta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan dasar untuk memilih judul tersebut diatas adalah :

³ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, (Modern English Prees, Jakarta: 1991), h. 30.

⁴ Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ,pasal 1 ayat 8

1. Alasan Obyektif

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Adiluwih belum berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini dapat dilihat dari data dilapangan bahwasannya kurang optimalnya kinerja Kepala Desa dalam membuat kebijakan untuk mengelola dana desa sehingga terjadinya penyalahgunaan dana desa.

2. Alasan Subyektif

Untuk mengetahui apakah implementasi Dana Desa di Pekon Adiluwih telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

C. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan pembagian wilayah administratif pada beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung, bahwasannya desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁵

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

⁵ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa dan Dana Desa*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama 2019), h. 7.

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁶ Salah satu sumber keuangan desa yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam setiap pekon di Kabupaten Pringsewu telah ditetapkan mendapatkan Dana Desa disetiap tahunnya yang dipergunakan untuk membiayai program pemerintah pekon dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran Dana Desa sangat berguna bagi kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penggunaan Dana Desa sering terjadi penyalahgunaan dana dan tidak transparan karena peran masyarakat yang kurang aspiratif dan partisipatif dengan pemerintahan desa. Hal ini sangatlah penting dilakukan agar Kepala Desa tidak membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri.

Contoh dari masalah Dana Desa dapat dilihat dalam Program Pemerintah dengan dikucurkannya Dana Desa yang cukup fantastis nilainya, namun sayang dalam penerapan penggunaan Dana Desa seringkali terdapat adanya tidak tepat sasaran dan transparan. Seperti yang terjadi di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dalam pengelolaan Dana Desa dikelola sendiri oleh Kepala Pekon tanpa mengikutsertakan aparatur pekon dalam kegiatannya. Beliau berusaha mengatur sendiri mekanisme pengelolaan Dana Desa di pekon dan berusaha terlihat mampu oleh masyarakat mengurus pembangunan pekon.

⁶ *Ibid*, h. 10.

Dalam pencairan Dana Desa melalui bank yang dicairkan oleh bendahara yang terjadi Kepala Pekon meminta agar dana tersebut dicairkan dan dipindah pada rekening pribadi milik Kepala Pekon sedangkan dalam bentuk penggunaan anggaran tidak ada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diterima oleh bendahara desa diduga anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi, tentu masalah seperti telah melanggar Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang dan korupsi. Seperti keterangan dari Sekertaris Pekon pada masa jabatan beliau banyak pengelolaan Dana Desa tidak transparan dan banyak pembangunan pekon seperti drainase yang tidak terselesaikan hingga saat ini⁷.

Hal ini terjadi karena Kepala Pekon lengah akan kewajiban sebagai pemimpin pemerintahan pekon. Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang desa dijelaskan bahwa Kades berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.⁸

Kegiatan musyawarah bersama masyarakat pekon untuk mendiskusikan suatu program pembangunan dan peraturan pekon sangatlah penting dilaksanakan agar menimbulkan sifat masyarakat yang aspiratif dan partisipatif serta rasa peduli dengan kemajuan perkembangan pembangunan pekon. Kendala pelaksanaan otonomi di desa telah membawa banyak kasus korupsi seperti: tiga Kepala desa dan seorang carik di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan tanah bengkok :

⁷ Dasipo, Sekertaris Pekon, wawancara dengan penulis, Pekon Adiluwih, Pringsewu, 20 Juli 2019.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 *Tentang Desa* , Pasal 26 Ayat 4

kepala desa di Kabupaten Ciamis, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh kepala desa.⁹ Semua itu terjadi dikarenakan kurangnya dorongan dari aparatur pekon untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang kegunaan Dana Desa.

Pada saat ini proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma yang menguntungkan diri sendiri dan tidak mengedepankan manfaat pembangunan desa bagi masyarakat desa. Akibatnya mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan yang tidak berkelanjutan sehingga masyarakat tidak merasakan kemajuan dan ketentraman hidup dilingkungannya sendiri. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur adanya upaya pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.¹⁰

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas Al-Qur'an maupun sunah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.¹¹ Allah SWT, menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintah-Nya dan ditinggalkan segala larangan-Nya.

⁹ Suchyo Heriningsih, Dwi Sudaryati, Lita Yulita Fitriyani (*Analisis Tata Kelola Dana Desa, Studi Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul*) Yogyakarta 2018, h. 3.

¹⁰ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 Ayat 8

¹¹ Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*, (Gaya Media Pratama :Jakarta 2014), h. 20.

Dasar hukum yang menunjukan perintah untuk mentaati pengelolaan dana desa, diantaranya terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S An-Nisā (4):58).

Dalam surat Annisa ayat 58 menerangkan bahwasannya kewajiban seseorang yang memiliki amanat memberikan sesuatu yang menjadi milik seseorang kepada yang berhak menerimanya dan membuat kebijakan sesuai atas dasar adil dan tidak menguntungkan diri sendiri demi mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pencegahan penyalahgunaan Dana Desa dilihat dari perspektif hukum Islam, yang dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di Pekon Adiluwih Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ?

2. Bagaimana Implementasi Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam perspektif Hukum Islam ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui implementasi pencegahan penyalahgunaan Dana Desa di pekon Adiluwih menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk dapat mengetahui implementasi pencegahan penyalahgunaan Dana Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 perspektif hukum Islam.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan pembangunan dari sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tatanegara.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai tujuan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan study pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Lampung dengan gelar Sarjana Hukum (S.H).

F. Metode Penelitian

Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat dilaksanakan dengan obyektif dan ilmiah serta hasil yang optimal, maka diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Maka menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui situasi kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹² Jadi penelitian ini bertujuan untuk mencari data dari lapangan untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- b. Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian mengumpulkan data-data yang telah disusun, jelaskan, dan kemudian diperoleh kesimpulan.¹³

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu wilayah generalasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh

¹² Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Grafik Grafika, 2011),h. 105.

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat dan aparatur pekon Adiluwih yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dengan jumlah populasi 3.885 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah objek dari populasi yang diambil melalui teknik sampling, yakni cara-cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap populasi.¹⁵ Metode pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan individu yang akan dijadikan responden dan informan.¹⁶ Pertimbangan yang dimaksudkan ialah memilih informan dari masyarakat dan aparatur pekon Adiluwih. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi berjumlah lebih dari 100 maka sampel yang diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁷ Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan besar sampel adalah rumus Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \rightarrow n = \frac{3.885}{1 + 3.885(0.20)^2} = \frac{3.885}{156,4}$$

$$n = 24,840$$

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 80.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 78.

¹⁶ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research 1*, (Yogyakarta : YP Fak, Psikologi UGM, 1985), h.89.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 134-135.

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = tingkat kesalahan 20% = 0,20 (tingkat kepercayaan 80%)

Berdasarkan hasil perhitungan maka sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 25 orang.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁸ Penelitian ini berlokasi di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. Dengan metode terjun langsung kelapangan maka penelitian ini akan mengetahui pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Dana Desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi¹⁹.

¹⁸ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru, 1991), h. 132.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.²⁰ Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan beberapa metode seperti :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan catatan dengan sistematis mengenai gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan terhadap pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

b. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²² Metode ini langsung diajukan kepada responden mengenai masalah yang diteliti terhadap pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

²⁰ Sugiyono. *Metodelogi Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 402.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1995), h. 192.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Alfabeta, cv. Bandung, 2014), h. 137-138.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.²³ Dokumen yang berkaitan dengan data mengenai pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

5. Metode Pengolahan Data

Sesudah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, Selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁴
- b. *Koding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban daripada responden kedalam kategori-kategori,²⁵ atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis.

²³ Sursimi Ari Kunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2014), h. 247.

²⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h. 115.

²⁵ *Ibid*,

- d. Penyusunan atau sistematis data (*contructing atau syistematzizing*), yaitu pengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²⁶

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif dengan cara mengorganisasikan, memilah-milahnya sehingga dapat dijadikan satuan yang dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain, Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara berfikir *deduktif* dengan terjun langsung lapangan, mempelajari, menganalisa dari fenomena di lapangan yang berakhir pada suatu kesimpulan baru yang bersifat khusus,²⁷ mengenai pelaksanaan Dana Desa di Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), Cet ke-1, h. 9.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosialisasi* (Jakarta, Gadjah Mada University Press, 998),h. 133.

BAB II

DESA DAN DANA DESA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam *De Legibus* menyatakan hukum adalah akal tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.¹ Dalam perspektif Marcus Tullius segala perbuatan yang boleh diperbuat dan aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia, antara yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, merugikan atau yang tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.

Abu Al-Husain Ahmad bin Faris mengemukakan kata hukum dalam Islam berasal dari kata *ح ك م* (حكم) mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.²

Al-Fayumi menyebutkan *حكم بمعنى قضى وفصل*, yaitu *hakama* bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah. Menurut Al-Fayumi

¹ Mustofa, Abdul Wahid., *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2009), h. 1, mengutip Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. (Bandung : Refika Aditama, 2004) h. 5.

² Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2006), h. 1.

hukum itu sendiri bermakna sebagai kebijaksanaan dalam memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan suatu permasalahan.³ Jadi, pengertian hukum dapat disimpulkan sebagai peraturan tentang tindakan atau tingkah laku yang ditetapkan dan diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Kemudian bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam telah dikenal kata hukum Islam yaitu penggabungan dari kedua suku kata hukum dan Islam. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua pemeluk agama Islam. Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Islam lebih mengenal hukum Islam sebagai fiqh karena dalam Al-Qur'an dan sunah tidak ada istilah *al-hukm al-Islam*.

Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fiqh Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (hukum *in abstracto*), maka syariat Islam yang dipahami dalam arti sempit. Karena kajian syariat Islam meliputi aspek *i'tidaqiyah*, *khuluqiyah*, dan *a'mal syar'iyah*. Sebaliknya bila hukum Islam menjadi

³ *Ibid.*

terjemahan dari fiqh Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian *Ijtihadi* yang bersifat *dzanni*.

Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang sudah terdapat dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Maka saat ini kedudukan fiqh Islam bukan lagi sebagai *hukum islam in abstracto* (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi *hukum Islam in concreto* (pada tataran aplikasi atau pembedaan). Sebab, secara formal hukum Islam sudah dinyatakan sebagai hukum positif, yaitu aturan yang mengikat dalam suatu negara.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam terdiri atas :

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadis
- c. Ijma'
- d. Qiyas

Untuk mengetahui pengertian dari sumber-sumber hukum Islam sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-qur'an adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁴ Al-Qur'an diturunkan sejak kenabiyah Muhammad saw. secara berangsur-angsur yakni sejak beliau berusia 40 tahun hingga beberapa waktu menjelang beliau wafat.

Menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1946, ayat Al-Qur'an yang pertama diturunkan itu disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. ketika beliau berumur 40 tahun, pada tanggal 17 Ramadhan bertepatan dengan 6 Agustus 610 M. Ayat sekarang terdapat dalam Surah Al-Iqra' (96) ayat 1-5, disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Muhammad bin Abdullah di Gua Hira dibukit cahaya (*jabal nur*) sebelah utara kota Mekah.⁵

Malam turunnya ayat Al-Qur'an yang pertama disebut *Nuzulul Qur'an* (turunnya Al-Qur'an) yang sejak kemerdekaan diperingati setiap tahun di Indonesia. Malam *Nuzulul Qur'an* ini dalam kepustakaan disebut juga malam *Lailatul Qadar* atau malam ketentuan. Sebab pada malam itu, Allah menentukan atau menetapkan : (1) mengangkat Muhammad bib Abdullah menjadi utusan Allah (Rasullullah), dan (2) Allah menentukan (permulaan) turunnya Al-Qur'an untuk menjadi pedoman dan pegangan hidup bagi umat manusia.⁶

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap hingga terhimpun dengan baik dan sempurna. Hikmah yang dapat diambil dari turunnya Al-Qur'an secara bertahap adalah untuk memudahkan penerimaan, pencatatan,

⁴ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), h. 9.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika : 2006), h. 27.

⁶ *Ibid.*

penghafalan, pemahaman maksud dan kandungan isinya serta memudahkan untuk dihayati dan diamalkan oleh kaum muslimin.

Proses turunnya wahyu melalui beberapa cara, antara lain: Malaikat Jibril datang menampakkan dirinya seperti seorang laki-laki, kemudian membacakan firman Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. Langsung menangkap dan memahami bacaan itu dengan baik, kemudian beliau menghafalkannya dengan sempurna. Sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Najm (53) 13 dan 14 :

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۚ

Dan Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidratil Muntaha (Q.S An-Najm (53): 13-14).

Ayat diatas menerangkan bahwasannya Nabi Muhammad saw. melihat Malaikat Jibril dengan wujud aslinya sebagaimana Allah SWT menciptakannya pada kesempatan yang lain di Sidratul Muntaha yaitu pohon yang paling besar bertempat paling tinggi dilangit ketujuh.

Dalam proses penulisan wahyu yang diterima dari Allah SWT, Nabi Muhammad saw. telah menunjuk sejumlah sahabat yang pandai membaca dan menulis. Sahabat-sahabat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah diantaranya adalah Abu Bakar As-Shiddqi, Umar bin Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah bin Arqam. Penulisan wahyu yang turun selanjutnya ditulis oleh para sahabat pada kulit, pelepah kurma, dedaunan, batu, tulang, dan sebagainya.

Tulisan-tulisan tersebut pada asalnya tersebar pada para sahabat penulis Al-Qur'an. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, seluruhnya dihimpun pada satu tempat atas saran Umar Bin Khattab. Sepeninggalan Abu Bakar kumpulan naskah Al-Qur'an disimpan oleh khalifah Umar bin Khattab dan putri beliau Hafsa. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan Al-Qur'an disalin ke dalam beberapa naskah, kemudian dikirimkan kepada beberapa penjur, yang seterusnya disalin lagi dan diperbanyak. Berkembangnya zaman naskah Al-Qur'an yang bermula dituliskan pada kulit, pelepah kurma, dedaunan, batu, tulang, dan sebagainya sekarang dapat disalin menjadi cetakan Kitab Suci.

b. Al-Hadis

Al-Hadis menurut bahasa adalah *khavar* atau berita. Menurut istilah, Al-Hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya (*taqrir*).⁷

Al-Hadis juga dapat disebut As-Sunnah, mengenai pengertiannya As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad saw. (*afalu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama ushul fiqh, As-Sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang dipindahkan dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir yang mempunyai kaitan dengan hukum. Pengertian inilah yang

⁷ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), h.13.

dimaksudkan untuk kata As-Sunnah dalam hadis Nabi: Sesungguhnya telah kutinggalkan untukmu dua perkara, yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (Al-Hadis).⁸

Walaupun pengertian As-sunnah dapat dikatakan sama dengan Al-Hadis Ada juga yang membedakannya. Perbedaanya, As-sunnah adalah sesuatu perbuatan yang beberapakali dilakukan oleh Nabi Muhammad saw., yang kemudian terus-menerus diikuti oleh sahabat dan dipindahkan kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Nabi Muhammad saw. melakukan perbuatan itu beserta para sahabat, kemudian hal itu diteruskan oleh para sahabat lain dan tabi'in, bahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sampai kepada kita saat ini. Al-Hadis itu sendiri adalah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun hanya sekali saja beliau mengerjakannya sepanjang hidupnya, dan walaupun seorang saja yang meriwayatkannya.

Perbedaan makna secara etimologi seperti ini, tidak mengurangi pentingnya arti As-Sunnah dan Al-Hadis. Sebab, mayoritas para ahli hadis, berdasarkan penelitian mereka menyamakan hadis dan sunnah. Para ulama Hadis telah bekerja keras dalam memeriksa dan menyeleksi sesuatu berita yang dikatakan sebagai Hadis. Apakah betul-betul dari Nabi Muhammad saw. atau bukan, mereka memeriksa dengan ketat, kemudian mengkategorikannya dalam derajat, ada yang *shahih* (dapat

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2006), h. 32.

dipergunakan sebagai dalil/*hujjah*), ada pula yang *dha'if* (tidak dapat dipergunakan sebagai dalil/*hujjah*).

Hadis *Shahih*, yakni Hadis yang telah diteliti dengan cermat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaran beritanya dari Nabi saw. karena pembawa beritanya (*sanad*) merupakan orang-orang yang jujur, dapat diandalkan hafalannya, kaitan *sanad*-nya satu sama lain saling bertemu, dan isinya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.⁹

Hadis *Dha'if*, yakni Hadis yang setelah diteliti dengan cermat ternyata mengandung kelemahan, baik dari segi pembawa beritanya (*sanad*) yang dipandang tidak jujur, buruk hafalannya, antara kaitan *sanad*-nya terputus, atau isinya bertentangan dengan Al-Qur'an.¹⁰ Hadis yang menjadi sumber hukum adalah Hadis yang *Shahih*, sedangkan Hadis *dha'if* tidak dapat dijadikan sumber hukum karena faktanya yang lemah dan isinya bertentangan dengan Al-Qur'an.

c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, Ijma' berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadis.¹¹

Dalam perkembangan zaman sudah pasti ditemukan masalah-masalah yang baru dalam kehidupan manusia yang perlu diketahui kedudukan hukumnya. Penemuan masalah-masalah yang baru ini adalah

⁹ Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2009), h.14.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

tugas para ulama *mujtahidin* untuk mengkaji kedudukan hukum dan menetapkan hukumnya atas dasar kesepakatan para ulama. Untuk menetapkan hukum suatu masalah yang belum ada dalil secara tegas dan jelas dari Al-Qur'an dan Hadis. Proses ijma tidak boleh lepas dari landasan Al-Qur'an dan Hadis, yaitu harus berpegang teguh kepada kaidah dasar agama. Jika ada Ijma' yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis maka Ijma' itu otomatis dinyatakan batal. Dengan demikian suatu pendapat dapat dikatakan Ijma' apabila memenuhi syarat dan rukun-rukun dari Ijma'. Juhur ushul fiqh mengemukakan bahwa rukun Ijma' yaitu :

1. Seluruh mujtahid sepakat dengan apa yang mereka putuskan, apabila ada diantara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil, maka kesepakatan yang dihasilkan itu tidak dinamakan Ijma'.
2. Mujtahid yang terlihat dalam memutuskan perkara tersebut adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam.
3. Kesepakatan itu disepakati setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya.
4. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran.
5. Sandaran hukum Ijma' tersebut haruslah Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw.¹²

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), Jilid. 2, h.53.

Apabila sudah mencapai rukun-rukun di atas yaitu bila telah berkumpul dan bertemu semua ulama Mujtahid dan dihadapkan kepada mereka suatu kasus yang memerlukan putusan hukum, kemudian setiap mujtahid mengemukakan pendapat dengan alasan yang terang dan jelas, baik dengan ucapan perkataan dan perbuatan, secara bersama-sama atau secara terpisah, ternyata pendapat mereka tentang hukum Islam tersebut sama tanpa ada perbedaan pendapat, maka hukum syara' yang disepakati tersebut menjadi wajib dan mengikat bagi seluruh umat muslim.¹³ Ijma terbagi menjadi dua Ijma' Shorih dan Ijma Sukuti.

Ijma' Shorih adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui dalam pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu dikemukakan dalam forum Ijma' yang setiap mujtahid memberikan alasan yang jelas dan semuanya sepakat dalam memutuskan hukum tersebut.

Ijma' Sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah dan tersebar luas, sedangkan Ijma' yang sebagian ulama memberikan pendapatnya dan sebagian yang lain tidak memberikan pandangannya dan hanya diam saja.¹⁴

d. Qiyas

Qiyas menurut bahasa artinya *ukuran*. Menurut istilah qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau perkara lain yang dipandang

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), Jilid. 1, h. 115.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996), Jilid. 2, h. 56.

memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya.¹⁵ Menurut Ibnu as-Subki, qiyas merupakan meletakkan hukum yang dimaklumi terhadap sesuatu yang maklum karena samanya 'illat hukumnya, menurut pandangan orang yang meletakkan itu.¹⁶ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, qiyas merupakan menggabungkan suatu masalah yang tidak ada nash tentang hukumnya terhadap suatu masalah yang sudah terdapat hukumnya dalam nash, karena adanya persekutuan keduanya dari segi 'illat.¹⁷

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemashlahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik didunia maupun akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan, yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yaitu: Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kasus hukum secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber itu, kemashlahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika dijelaskan, kemashlahatan itu menjadi titik tolak penentuan hukumnya. Kemashlahatan seperti itu lazim digolongkan dalam Al-Maslahat Al-Mughat.¹⁸

Dalam permasalahan skripsi ini tujuan hukum Islam yaitu untuk mematuhi perintah Allah SWT dalam menjalankan amanat dengan baik seperti yang terdapat dalam firman Allah surat An-Nisā ayat 58:

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h.85.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh*, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1986), h. 48.

¹⁸ Wati Rahmi Ria, SH. MH. ,*Hukum Perdata Islam*, (CV. Anugrah Utama Raharja: Lampung, 2018), h. 6-7.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S An-Nisā (4):58).

Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umatnya. Sebuah amanat merupakan kepemilikan seseorang yang berhak diterimanya dan disampaikan oleh orang lain yang diberikan amanat. Dalam menyampaikan amanat harus secara jujur dan dipercaya seperti keterangan Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yaitu:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ (رواه البخاري و مسلم)

“Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kedalam surga.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis yang mulia ini telah menjelaskan tentang sifat jujur yang harus dimiliki dari setiap manusia termasuk dalam menyampaikan amanat. Sifat kepribadian manusia yang jujur akan membawa kita kejalan yang benar dan mendapatkan berkah Allah SWT serta mendekatkan kita masuk dalam surga. Semua hamba Allah yang bersifat jujur akan terhindar dari sifat kemunafikan dan tidak amanat.

¹⁹ Ibnu Hajar Al-As-qolani, *Bulughul marom min adilati al-ahkam*, (Jakarta: Dar-Al Kutub), h. 123.

Perintah Allah SWT dalam setiap larangannya membimbing umat manusia ke jalan yang benar serta memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupannya, menghindari mafsadat baik didunia maupun akhirat. Tujuan hukum Islam diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didunia maupun akhirat.

4. Ciri-Ciri Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak dan mempunyai ciri-ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga spesifikasi yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah yaitu :²⁰

1. *Takamul*

Takamul yakni sempurna bulat dan tuntas serta komprehensif. Hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat (*Takamul*) walaupun umat Islam itu berbeda-beda bangsa dan suku. Dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu, meskipun dalam segi kebudayaan berbeda-beda. Walaupun masa berganti masa hukum Islam tetap mempunyai ciri khas.

2. *Wasathiyah* (moderat)

Hukum Islam memenuhi jalan tengah, jalan wasathan, jalan yang seimbang, tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak berat pula ke kiri mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori *wasathiyah*, menyelaraskan antara kenyataan dan fakta ideal dan cita-cita. Hal ini disebutkan dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an,

²⁰ *Ibid*, h. 8.

diantaranya terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 143. Kata *wasath* dalam Al-Qur'an senantiasa dipergunakan pada kedudukan yang paling baik diantara tiga kedudukan, yaitu *Ifraṭh*, *I'tidal*, dan *Tafriṭh*.

3. *Harakah* (bergerak, berkembang dan dinamis).

Dari segi *harakah*, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dari dalam, yaitu : Islam yang memberikan sejumlah hukum positif kepada manusia yang dapat dipergunakan dalam segenap masa dan tempat.

4. *Universal*

Akidah dan Hukum Islam tidak ditunjukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai rahmatan lil 'alami, sesuai dengan tugas yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Hukum Islam diturunkan Allah guna dijadikan pedoman hidup seluruh manusia bertujuan memperoleh kebahagiaan didunia dan diakhirat. Dengan demikian hukum Islam bersifat universal, untuk seluruh umat manusia dimuka bumi serta dapat diberlakukan disetiap bangsa dan negara. Kenyataan bahwa agama Islam telah menyebar keseluruh penjuru dunia. Ini suatu bukti keuniversalan Islam yang dapat diterima oleh setiap bangsa yang dapat memahami esensi ajaran Islam.

Beralaku atau tidaknya hukum Islam disuatu negeri tidak menguarangi keuniversalan sebab hal itu bergantung pada kesadaran

bersyariat dari masyarakat Islam di negeri yang bersangkutan. Bagi orang yang kualitas imannya dan pemahamannya terhadap hukum Islam tinggi, ia akan mengamalkannya secara utuh dalam setiap aspek kehidupannya.

5. *Elastis dan Manusiawi*

Hukum Islam berisi ketaatan yang dibebankan kepada setiap mukalaf. Ketaatan tersebut wajib dilaksanakan oleh para mukalaf dan berdosa bagi yang melanggarnya. Meskipun jalurnya sudah jelas membentang dalam keadaan tertentu terdapat *rukhsah* (kelonggaran). Kelonggaran tersebut menunjukkan hukum Islam itu bersifat elastis, luwes, dan manusiawi.

B. Desa menurut Undang-undang dan Hukum Islam

1. Pengertian desa menurut Undang-undang

Pada umumnya desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakat bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh Kepala Desa, (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung,

dusun, (3) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota, (4) tempat, tanah, daerah.²¹

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²² Dalam pengertiannya hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dengan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain seperti sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Dalam menjalankan pemerintahan, negara mengatur satu kesatuan dari tingkat rendah hingga tinggi melalui perkembangan desa hingga pusat. Penyelenggaraan pemerintahan desa berkewajiban untuk membantu tugas pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan hak asal usul yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan pemerintah desa agar menjadi satu kesatuan yang

²¹ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2007), h. 286.

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa* Pasal 1 Ayat 1.

terorganisir desa memiliki kepala desa sebagai pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintah desa dan dibantu dengan aparatur desa.

Ciri-ciri umum pada desa menurut Suhartono, yaitu: (1) pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani atau agraris, (2) dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang dominan, (3) faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya, (4) tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat terganti dengan sendirinya, (5) kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan (6) mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.²³

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diantaranya :

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
2. Jumlah penduduk yaitu :
 - a. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.

²³ Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, (Lapera Pustaka Utama: Yogyakarta, 2000), h. 14.

- b. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
 - c. Wilayah Sumatra paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
 - d. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.
 - e. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
 - f. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga.
 - g. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
 - h. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
 - i. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- 3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah.
 - 4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
 - 5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

6. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik.
7. Tersedianya dana oprasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa mempunyai otonomi sendiri dan batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴ Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.

2. Pengertian Desa Menurut Hukum Islam

Desa dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang dalam satu wilayah di dalam negara yang dapat mengatur dan mengurus pemerintahan atas kepentingan masyarakat dengan hak asal-usul di setiap wilayah dalam satu negara. Mengenai pengetian desa berbagai, ahli memiliki pendapat masing-masing diantaranya.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan

²⁴ Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* ,Pasal 1 ayat 2.

masyarakat tersebut mengadakan pemerintahan sendiri.²⁵ Dalam pemukiman, masyarakat memegang kendali dari berbagai aspek dalam mengelola dan memerintah desa. Eddi Handono mengemukakan bahwa desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu : (1) desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antara mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, dan (2) desa sering diidentikan dengan organisasi kekuasaan. Melaluiacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.²⁶

Desa merupakan salah satu daerah otonomi yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis bahwa, desa adalah suatu pemerintahan terendah. Salah satu bentuk urusan Pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.²⁷

Dalam hukum Islam desa diartikan pada kamus bahasa arab القرية

berarti desa disebut “*qoryah*” karena ada perkumpulan orang didalam lokasi

²⁵ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1984), h. 280.

²⁶ Eddie B. Handono, *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif : Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, FPPD, Yogyakarta, 2015, h.132.

²⁷ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Erlangga, Jakarta: 201), h.81.

tertentu. Perkumpulan orang yang tinggal dan hidup dalam lokasi tertentu dinamakan penduduk.²⁸ Qoryah dapat diartikan sebagai kumpulan masyarakat dalam suatu wilayah yang mengatur dan mengurus pemerintahan atas kepentingan masyarakat dengan hak asal usul dalam satu wilayah negara. Salah satu contoh dalil Al-Qur'an tentang "qoryah" adalah:

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka (Q.S Yā-sīn (36):13).

Allah SAW telah berfirman, memerintahkan kepada Nabi-Nya agar membuat suatu perumpamaan terhadap kaumnya yang telah mendustakannya (Ya-Sin :(13)). Ibnu Ishaq telah mengatakan berdasarkan berita yang disampaikan kepada Ibnu Abbas r.a, Ka'bul Ahbar, dan Wahb Ibn Munabbih, bahwa negeri yang dimaksud adalah Intakiyah, yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikhas. Ia adalah seorang penyembah berhala, maka Allah mengutus kepada tiga orang rasul itu bernama Sadiq, Saduq, Syalum, tetapi raja itu mendustakan mereka.²⁹

Pada masa Rasulullah SAW "qoryah" adalah sebutan nama penduduk dan tempat sebagai kumpulan orang-orang yang tinggal disekitarnya. Seperti sebutan pada penduduk Intakiyah dalam firman Allah dengan menggunakan kata "qoryah".

²⁸ Kamus Bahasa Arab *Al-Munawir* (Pustaka Progresif : Surabaya, 1984), h. 299.

²⁹ Tafsir Ibnu Katsir (On-Line), tersedia di :

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-yasin-ayat-13-17.html?m=1> (25 November 2019).

Dalil lain dalam Al-Qur'an Sebutan "*qoryah*" sebagai penduduk seperti firman Allah SAW dalam surat Al-Kahf ayat 77 yaitu:

فَانْطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegkkannya. Dia (Musa) berkata, " Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." (Q.S Al-Kahf (13): 77)).

Dalam firman Allah disebutkan :

" حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ "

"Hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri "

Surat Al-Kahf ayat 77 juga menyebutkan "*qoryah*" sebagai penduduk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari setiap firman Allah SAW mayoritas penggunaan kata "*qoryah*" menunjukkan nama tempat dan juga sekumpulan penduduk yang menempati suatu wilayah geografis tertentu.

C. Dana Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

1. Pengertian Dana Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.³⁰ Keuangan desa

³⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 1 Ayat 10.

berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Bantuan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersumber dari APBN adalah program Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³¹

Jadi, dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa-desa di setiap Kabupaten tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai

³¹ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa dan Dana Desa*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama 2019), h. 135.

dengan kebutuhan dan prioritas desa. Dalam pengertian ini Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dalam bentuk APBDesa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.³²

2. Fungsi Dana Desa

Peran Dana Desa sangat berguna dan membantu proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mensejahterakan masyarakat. Memberikan bantuan biaya melalui program yang diajukan desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.³³ Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.³⁴

³² Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa dan Dana Desa*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama 2019), h. 153.

³³ Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, Pasal 19 ayat 1.

³⁴ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa dan Dana Desa*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama 2019), h. 159-160.

3. Tujuan Dana Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri yaitu :

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.³⁵

Dalam menciptakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera pendapatan desa secara keseluruhan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa yang

³⁵ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2015), h. 54.

mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Tujuan Dana Desa untuk masyarakat adalah meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan prekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam pasal 72 ayat 2 menjelaskan alokasi pendapatan anggaran desa yang bersumber dari belanja pusat adalah untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.³⁶

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.³⁷

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif,

³⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*, Pasal 72 Ayat 2.

³⁷ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa dan Dana Desa*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama 2019), h. 121.

secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.³⁸

4. Pemantauan Dan Pengawasan Dana Desa

Peran masyarakat yang aspiratif dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus diterapkan. Perihal tersebut penting dilakukan supaya penyelenggaraan pemerintah desa berjalan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Selain itu juga untuk mencegah persoalan seperti penyalahgunaan Dana Desa. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjamin partisipasi aktif masyarakat.

Dalam Pasal 68 disebutkan masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, mendapatkan informasi dari pemerintahan desa dan berhak mendapatkan pengayoman, perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

Bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas dipahami dalam arti kehadiran, melainkan akses masyarakat dalam mengambil keputusan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam setiap kegiatan desa seperti penggunaan dan pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Hal tersebut penting dilakukan untuk mendorong kinerja pemerintahan desa agar berjalan demokratis. Untuk itu pemerintahan desa

³⁸ Rosnawati, "Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kab. Way Kanan Dalam Prespektif Islam", (Skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2015), h. 3.

juga harus menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bentuk pengawasan dan pemantuan kegiatan desa dalam penggunaan dan pelaksanaan Dana Desa yaitu :

1. Masyarakat desa melakukan pemantauan terhadap pembangunan desa seperti penggunaan dan pelaksanaan Dana Desa.
2. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan keluhan masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan desa.
3. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 tahun sekali.
4. Masyarakat desa berpartisipasi dalam menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa dalam musyawarah desa.

D. Tinjauan Pustaka

Desa merupakan daerah otonomi paling kecil di pemerintahan, yang berhak dan mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya desa membutuhkan keuangan desa yang bersumber dari Negara, Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan dari APBDesa itu sendiri. Salah satu keuangan desa yang

peneliti bahas adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa-desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.³⁹ Dana yang bersumber dari APBN langsung ditransfer ke setiap desa di Indonesia dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah.

Dalam upaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan Dana Desa diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang desa. Penjelasan ini mengemukakan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan mentransferkan ke sejumlah desa di Indonesia melalui pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah dalam tujuan membantu penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sucahyo Heriningsih, Dwi Sudaryati, dan Lita Yulita Fitriyani Kendala pelaksanaan otonomi di desa telah membawa banyak kasus korupsi seperti: tiga kepala desa dan seorang carik di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa dan tanah bengkok, serata kasus korupsi dana irigasi dilakukan oleh Kepala desa di Kabupaten ciamis, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh kepala desa.⁴⁰ Tujuan

³⁹ Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan, Perundang-Undangan Tentang Desa dan Dana Desa*, (Yogyakarta : Cetakan Pertama 2019), h. 135.

⁴⁰ Sucahyo Heriningsih, Dwi Sudaryati, Lita Yulita Fitriyani, (*Analisis Tata Kelola Dana Desa*, Studi di Kecamatan Bangun Tapan Kabupaten Bantul) Yogyakarta 2018, h. 3.

penelitian ini untuk mengetahui implementasi pencegah penyalahgunaan Dana Desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dilaksanakan di Pekon Adiluwih Kabupaten Pringsewu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman .*Sumber Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995).
- Al-Khudhari Biek, Muhammad .*Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007).
- Ari Kunto, Sursimi .*prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta : PT
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam I*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4*,
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosialisasi*, Jakarta: Gadjah Mada
- Handono, Eddie B. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif : Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*, FPPD, Yogyakarta, 2015.
- Haroen, Nasrun .*Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos, 1996).
- Ibrahim, Johannes dan Sewu Lindawati. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung : Refika Aditama, 2004.
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Hukum Islam Indonesia Modern*, Jakarta, 2014.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kamus Bahasa Arab *Al-Munawir* (Pustaka Progresif : Surabaya, 1984).
- M. Amirin, Tatang .*Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung : Sinar Baru, 1991)
- Muhammad, Abdulkadir . *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014).
- Muri Sari, Retno .*Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*, Jilid 7, 2015.
- Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Sinar Grafika : 2009.
- Noor, Juliansyah . *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2017.

Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta Erlangga, 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014, *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*.

Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, (Modern English Presses, Jakarta: 1991).

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2007).

Rahmi Ria, Wati. *Hukum Perdata Islam*, (CV. Anugrah Utama Raharja : Lampung, 2018).

Rahmi Ria, Wati. *Hukum Perdata Islam*, (CV. Anugrah Utama Raharja : Lampung, 2018).

Renika Cipta, 2014.

Rosnawati, “*Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kab. Way Kanan Dalam Prespektif Islam*”, (Skripsi Program Strata 1 IAIN, Lampung, 2015).

Sholeh, Chabib dan Rochansjah, Heru. *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung : FOKUSMEDIA, 2015).

Soeharto, Irwan *.Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

Sucahyo Heriningsih, Dwi Sudaryati, Lita Yulita Fitriyani (*Analisis Tata Kelola Dana Desa, Studi Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul*) Yogyakarta 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, cv. Bandung, 2014

-----, *Metodelogi Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2009.

Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, Lapera Pustaka Utama: Yogyakarta, 2000.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M
Sutrisno, Hadi . *Metodologi Reasearch 1*, (Yogyakarta : YP Fak. Psikologi UGM, 1985).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Lagos Wacana Ilmu, 1997).

Tentang Desa dan Dana Desa, Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2019.

Tim Redaksi Laksana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan*

Undang-Undang No 6 Tahun 2014, *Tentang Desa*.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
University Press, 998.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafik Grafika, 2011.

-----, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika : 2006.

Zuhaili, Wahbah *Ushul Fiqh*, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1986).

